



Komunikasi Wartawan dalam Reportase Konflik Agama

Enjang Muhaemin^{1*} & Dono Darsono²

¹² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

* email.enjangmuhaemin@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore the meaning and motives of journalists in reporting on religious conflicts and explore journalists' views on the root causes and solutions of religious disputes. This study uses a qualitative approach; the considerations are expected to produce descriptive data, both written, oral, and the behavior of journalists in reporting. The results show that journalists generally interpret religious conflicts as enjoyable, meaningful, and sensitive events. The motives of journalists to report on religious conflicts are more in the interest of documenting newsworthy events, placing problems in a balanced way, and straightening out information confusion in the community. The causes of conflict occur due to differences in perspectives, misunderstandings, intolerance, excessive fanaticism, weak legal umbrella, government indecision, immature religious understanding, the inability of religious leaders to suppress mass emotions, and the presence of certain interested parties. The conflict solution that must be carried out is the existence of a clear and firm legal settlement umbrella and the importance of dialogue in policy formulation.

Keywords: *journalists' motives; religious conflict; conflict reporting.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemaknaan, dan motif wartawan melakukan reportase konflik agama, serta menggali pandangan wartawan tentang akar penyebab dan solusi konflik agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pertimbangannya diharapkan menghasilkan data deskriptif, baik tulisan, lisan, maupun perilaku wartawan dalam melakukan reportase. Hasil penelitian menunjukkan, wartawan umumnya memaknai konflik agama sebagai peristiwa menarik, penting, dan sensitif. Motif wartawan melakukan reportase konflik agama lebih pada kepentingan mengabarkan peristiwa yang bernilai berita, mendudukan masalah secara berimbang, dan meluruskan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Penyebab konflik terjadi akibat perbedaan perspektif, kesalahpahaman, intoleransi, fanatisme berlebihan, lemahnya payung hukum, ketidaktegasan pemerintah, pemahaman agama yang kurang matang, kurang kemampuan tokoh agama meredam emosi massa, dan adanya pihak tertentu yang berkepentingan. Solusi konflik yang harus dilakukan yakni adanya payung penyelesaian hukum yang jelas dan tegas, serta pentingnya dialog dalam perumusan kebijakan.

Kata Kunci: motif wartawan; konflik agama; reportase konflik.

PENDAHULUAN

Indonesia yang tergolong masyarakat multi-agama, peristiwa konflik agama dapat dikatakan sangat rentan terjadi. Media tak selalu hadir menjadi bagian dari solusi damai, bahkan dalam kasus tertentu terkadang justru menjadi pengobar konflik agama menjadi lebih besar. Dalam peristiwa konflik agama, wartawan sejatinya memiliki peran strategis di dalam mengangkat data dan fakta yang akan menguatkan lahirnya rekonsiliasi para pihak yang berkonflik. Kuncinya, kearifan mendalam dan pertimbangan matang wartawan dalam menentukan narasumber dan sudut pandang pemberitaan menjadi hal mutlak.

Mengingat posisi strategis itulah, dewan pers dan organisasi kewartawan duduk bersama merumuskan komitmen untuk lebih meningkatkan kesadaran wartawan dalam membangun masyarakat multi-agama yang lebih harmoni. Wartawan seyogyanya mengangkat pemberitaan konflik agama dengan lebih terfokus pada lahirnya rekonsiliasi. Ini penting mengingat konflik keagamaan dapat terjadi di mana saja, dan kapan saja, terutama pada masyarakat yang multiagama seperti yang ada di sejumlah daerah di Indonesia.

Data riset terkait konflik dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia cukup memprihatinkan. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina merilis data bahwa insiden kekerasan di Indonesia sejak 1990 hingga 2008 ada sebanyak 274 kasus. Dari jumlah ini, 47,8 persen merupakan kasus konflik agama. Pelaku kekerasan dari kelompok agama terungkap menempati urutan kedua, yakni 10,6 persen. Selebihnya kasus-kasus lainnya. Tak berhenti di tahun 2008, insiden bernuansa agama juga terus terjadi dari 2019 hingga 2015. Beberapa kasus itu di antara insiden di Cikeusik, Banten, Konflik Tolikara di Papua, Konflik Singkil di Aceh, insiden Gafatar di Mempawah Kalbar, dan insiden di Bangka (Sihaloho, 2016).

Dalam pandangan Kimball (2013: 1), cinta kasih, pengorbanan diri, dan pengabdian kepada orang lain sering kali berakar begitu mendalam pada pandangan dunia keagamaan. Pada saat yang sama, sejarah menunjukkan bahwa agama sering kali dikaitkan secara langsung dengan contoh terburuk perilaku manusia. Kedengarannya usang, tetapi sayangnya benar, jika dikatakan bahwa dalam sejarah manusia, perang membunuh orang, dan kini semakin banyak lagi kejahatan lebih sering dilakukan atas nama agama dibandingkan atas nama kekuatan institusional lain. Merujuk dua kondisi yang bertolak belakang ini, tak aneh bila kemudian agama dinilai sebagai sesuatu yang paradoks. Di satu pihak, agama dialami sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta, dan perdamaian. Di lain pihak, sejarah menunjukkan, agama justru menjadi sumber, penyebab, dan alasan bagi kehancuran dan kemalangan umat manusia. Karena agama, orang bisa saling mencinta. Tetapi atas nama agama pula, orang bisa saling membunuh dan menghancurkan (Sindhunata, 2013).

Dalam menyikapi konflik agama, wartawan semestinya tidak mengomodifikasi dan mendramatisasi konflik secara berlebihan. Beritakan peristiwa secara jernih, arif, dan bersikap netral. Peristiwa tentang konflik agama tergolong berita sensitif, dan mudah membakar emosi keagamaan khalayak media dari agama yang terlibat, sehingga pemberitaan konflik agama sering diandalkan untuk mendongkrak oplah, rating, share, atau hit. Namun dalam perspektif ideal, media tetap harus memperhatikan urgensi dan dampak pemberitaan. Pemberitaan media yang menggebu-gebu jangan sampai justru memperkeruh suasana, dan mempersulit upaya rekonsiliasi atau penyelesaian konflik. Pendeknya, media idealnya mampu meredam atau mengurangi konflik, bukan malah memperkeruh dan mempertajam konflik.

Beberapa peneliti menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membingkai konflik agama. Pembingkaiian (*framing*) media satu dengan media lainnya bahkan kerap berbeda satu sama lain (Uswatussholihah, 2013; Sofian dan Hussein, 2013). Pembingkaiian media cenderung vulgar, sarkas dan provokatif (Rusmulyadi, 2013). Namun, pembingkaiian media juga dapat sebaliknya, lebih mengarah pada orientasi perdamaian, menonjolkan akar masalah, dan menampilkan tokoh bijak di luar lingkaran konflik (Juditha, 2016).

Dalam konteks penelitian penulis terdapat beberapa penelitian lain yang dapat dijadikan komparasi. *Pertama*, penelitian Sofian dan Hussein yang berjudul “*Media Coverage on Religious Conflict in Malaysia : A Preliminary Study on How The Star and Utusan Malaysia Framed the Attempts to Subvert the Faith and Believe of Muslims in a Multiracial Thanksgiving Dinner at DUMC*”. Hasil risetnya dimuat pada *Jurnal Procedia; Social and Behavioral Sciences* (2013). Penelitian memokuskan kajian pada dua surat kabar utama (*The Star* dan *Utusan Malaysia*) terkait pemberitaan konflik agama di Malaysia guna mengkaji dan membandingkan bagaimana dua surat kabar berbeda bahasa ini di dalam menyajikan pemberitaan konflik agama. Khususnya konflik agama dalam kasus pemurtadan umat Islam dalam acara *Dinner Thanksgiving* multiras di DUMC, yang diselenggarakan oleh Harapan Komuniti pada 3 Agustus 2011. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola cakupan masalah, mengidentifikasi sumber berita yang digunakan pers, menganalisis pembingkaiian berita, dan mengidentifikasi titik bidik berita terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Dari sisi substansi, penelitian penulis dengan riset Sofian & Hussein itu memiliki sedikit kesamaan dari topik besarnya, yakni konflik agama. Riset ini lebih memilih analisis konten, sementara riset penulis lebih terfokus pada fenomenologi wartawan sebagai pelaku reportase konflik agama, baik di dalam memaknai konflik agama, motif reportasi, maupun kaitannya dengan pemahaman wartawan tentang sumber dan solusi konflik agama yang terjadi.

Kedua, penelitian Uswatussholihah pada *Jurnal Penelitian Agama* (2011) yang

menelaah tentang “*Ahmadiyah Dalam Sorotan Media Cetak Nasional: Analisis Wacana Terhadap Koran Republika dan Kompas*”. Penelitian ini menggunakan model *Critical Discourse Analysis* (CDA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fenomena dan isu Ahmadiyah diwacanakan oleh *Republika* dan *Kompas* secara berbeda. *Republika* mewacanakan masalah Ahmadiyah sebagai kelompok yang menyimpang dari Islam. Karenanya, penerbitan SKB Ahmadiyah merupakan amanat undang-undang untuk mengatasi konflik akibat penistaan dan penodaan agama oleh Ahmadiyah. Dengan demikian pembubaran Ahmadiyah adalah solusi terbaik. *Republika* juga mewacanakan bahwa Ahmadiyah adalah masalah intern umat beragama Islam, sehingga biarkan umat Islam yang menyelesaikannya, umat non-muslim tidak usah ikut campur.

Adapun *Kompas* mewacanakan masalah Ahmadiyah sebagai masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kebebasan ini mestinya sebagai bagian dari HAM dan dilindungi oleh undang-undang. Sebab itu, penundaan SKB adalah masalah biasa, dan tidak perlu dibesar-besarkan. *Kompas* menilai bahwa warga Ahmadiyah sebagai golongan minoritas di Indonesia selalu menjadi korban kekerasan anggota masyarakat yang emosi dan tidak suka terhadap Ahmadiyah. Perbedaan konstruksi wacana permasalahan Ahmadiyah antara *Republika* dan *Kompas* tidak bisa dilepaskan dari ideologi dan kecenderungan masing-masing media.

Kesamaan penelitian penulis dengan riset Uswatussholihah lebih pada konflik agama sebagai topik utamanya. Dari sisi perbedaan, bila riset Uswatussholihah menggunakan analisis wacana kritis atas pemberitaan dua media yang berbeda dengan maksud mencari komparasi antara keduanya, sementara penulis memilih fenomenologi dengan tujuan menggali dan menggambarkan pemaknaan, motif, dan pemahaman wartawan dalam kaitannya dengan reportase konflik berbasis agama. Bila Uswatussholihah menelaah perbandingan media secara kritis, penulis lebih menggali pengalaman sadar wartawan sebagai pelaku reportase konflik agama. Bila Uswatussholihah lebih terfokus pada produk berita yang dihasilkan wartawan, penulis lebih terfokus pada proses dan pengalaman wartawan dalam melakukan reportase.

Ketiga, penelitian Juditha bertajuk "Jurnalisme Damai dalam Berita Konflik Agama Tolikara di Tempo.co." yang dimuat pada Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik (Vol. 20 No. 2, Desember 2016). Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang penerapan jurnalisme damai dalam berita tentang konflik agama Tolikara di Tempo.co. Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar berita yang dimuat di Tempo.co mengarah pada orientasi perdamaian. Mayoritas berita menonjolkan akar masalah, serta banyak menampilkan tokoh bijak di luar lingkaran konflik. *Tempo.co* cenderung kurang menampilkan pelaku konflik, serta gambaran kerugian konflik sebagai cermin untuk perdamaian. Bahkan untuk

sumber atau orang-orang yang terlibat langsung dalam konflik sama sekali tidak ada. Opini pada orientasi kebenaran juga tidak ditemukan. Sedangkan orientasi penyelesaian solusi yang ditawarkan relatif lebih banyak.

Penelitian penulis dengan riset Juditha memiliki kesamaan dalam topik inti yakni konflik agama. Sejumlah perbedaan dengan penelitian penulis tampak jelas. Bila Juditha terfokus meneliti konflik agama sebagai sebuah produk berita, penulis terfokus mengkaji wartawan sebagai pelaku reportase atas peristiwa konflik agama. Bila Juditha menggunakan kuantitatif, penulis justru memilih kualitatif. Relevansinya dengan penelitian penulis terutama dalam kaitannya dengan konflik agama sebagai topik riset yang memang menarik diteliti. Perbedaan ini menjadi referensi penting bagi penulis untuk melihat lebih dalam tentang konflik agama dari metode yang berbeda.

Keempat, penelitian Rusmulyadi (2013) berjudul “*Framing Media Islam Online atas Konflik Keagamaan di Indonesia*”. Hasil risetnya menyatakan bahwa dalam melakukan pewartaan atau membuat berita konflik keagamaan, tiga media Islam online yaitu *arrahmah.com*, *voa-islam.com* dan *hidayatullah.com* telah melakukan pembingkaihan (*framing*) yang cenderung vulgar, sarkas dan provokatif. Hal ini dinilai akan membentuk opini pembaca yang pada akhirnya meresahkan masyarakat. Media dinilai tampil tidak sebagai juru damai peredam konflik, tapi sebaliknya memperburuk keadaan sehingga konflik berkepanjangan.

Penelitian penulis dengan Rusmulyadi memiliki titik kesamaan dalam topik riset bertajuk konflik agama. Perbedaannya bila Rusmulyadi memilih framing media atas konflik agama yang terjadi di Indonesia, penulis lebih memilih pemaknaan, motif, dan pemahaman wartawan atas konflik agama yang terjadi. Penelitian Rusmulyadi terfokus pada produk jurnalistik hasil reportase wartawan, penulis terfokus pada fenomenologi wartawan sebagai sebagai pelaku reportase dalam peristiwa konflik agama.

Berpijak pada beberapa penelitian di atas tergambar bahwa penelitian konflik agama lebih dominan menelaah konflik agama sebagai produk jurnalistik (berita) dibanding penelitian penulis yang terfokus pada pelaku reportase suatu peristiwa konflik agama. Penelitian konflik agama juga cenderung dominan menggunakan *framing*, analisis wacana ataupun analisis isi. Riset penulis yang memokuskan pada pemaknaan, motif, dan pemahaman wartawan dalam kaitannya dengan konflik agama yang terjadi di tengah masyarakat belum banyak tersentuh. Peneliti terkait konflik agama umumnya juga menggunakan paradigma positivistik ataupun kritis dibanding paradigma konstruktivistik. Padahal, paradigma, pendekatan, dan metode penelitian yang berbeda akan sangat mungkin melahirkan hasil penelitian yang berbeda pula.

Dalam konteks itulah, penulis tertarik untuk meneliti konflik agama dengan menggunakan paradigma konstruktivistik dengan bersandar pada

fenomenologi sebagai metode penelitian. Riset tentang wartawan dan konflik agama dengan menggunakan paradigma, pendekatan, dan metode berbeda diharapkan bukan hanya akan menarik, tetapi juga akan melengkapi hasil kajian yang umumnya berpijak pada paradigma positivistik atau pun penelitian yang berbasis pada paradigma kritis selama ini. Implikasinya, keberagaman cara pandang peneliti dan kelengkapan hasil kajian diharapkan dapat memberikan deskripsi komprehensif dalam membaca problem-problem massal kemasyarakatan. Lebih jauhnya diharapkan dapat memberikan solusi yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat, dan komprehensif.

Penelitian fenomenologi ini bermaksud menggambarkan makna, motif, dan pemahaman wartawan dalam konteks reportase konflik berbasis agama. Menurut [Littlejohn & Foss \(2014: 57\)](#), teori-teori dalam tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang aktif menginterpretasi berbagai pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan pada pengalaman sadar seseorang. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya. Fenomenologi adalah strategi penelitian di mana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang pengalaman tertentu ([Cresswel, 2014: 20](#)).

Dengan merujuk pada sejumlah penelitian tentang media, wartawan, dan konflik agama yang lazimnya dilakukan dengan pendekatan kritis dan analisis wacana, maka penelitian fenomenologi ini diharapkan akan memunculkan perspektif baru yang lebih mendasar dan komprehensif. Secara teoritik, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang bisa melengkapi dan mewarnai hasil kajian-kajian sejenis yang dilakukan baik dengan pendekatan analisis wacana maupun perspektif kritis yang umumnya dilakukan.

Dalam konteks komunikasi massa yang berbasis ideologi, budaya, dan agama yang berbeda, seperti halnya penelitian tentang pemaknaan, motif, dan pemahaman wartawan dalam reportase konflik agama menjadi menarik dikaji. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan para wartawan tentang konflik berbasis agama, mengeksplorasi motif wartawan di dalam reportasi konflik agama, dan mengetahui pemahaman wartawan terkait sumber dan solusi konflik agama yang diharapkan akan sangat bermanfaat bagi terbangunnya harmoni keberagaman di tengah kehidupan masyarakat yang plural.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi, teori interaksi simbolik, dan teori konflik. Ketiga ini dijadikan sebagai “alat bedah” dalam mengupas hasil penelitian terutama untuk mengungkap pemaknaan, motif, dan pemahaman wartawan tentang konflik agama. Teori fenomenologi tidak bisa dilepaskan dari Alfred Schutz, salah seorang tokoh fenomenologi, yang juga setuju dengan Weber tentang pengalaman dan perilaku manusia dalam dunia sosial keseharian sebagai realitas yang bermakna secara sosial. [Alase \(2017\)](#)

megatakan fenomenologi sebagai metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti untuk menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Creswell (Eddles-Hirsch, 2015) menegaskan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari. Penelitian kualitatif dapat dimaknai sebagai penelitian yang bersifat interpretif yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. Ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam studi ini, peneliti melakukan wawancara kepada wartawan dari 9 media massa yang memiliki pengalaman dalam melakukan peliputan konflik bernuansa agama. Peneliti menentukan informan penelitian dengan menggunakan sistem *snowball*. Dalam penelitian ini terdapat sebanyak 9 informan, yang secara keseluruhan berasal dari 9 media massa, baik media cetak, televisi, radio, maupun media *online*. Rinciannya adalah 2 (dua) wartawan surat kabar, 3 (tiga) wartawan televisi, 1 (satu) wartawan radio, dan 3 (tiga) media *online*. Kesembilan media yang wartawannya menjadi informan dalam penelitian adalah *Tribun Jabar*, *Koran Sindo*, *Radio Elshinta*, *TV One*, *Trans TV/CNN Indonesia*, *Inews TV*, *Beritabandung.com*, *Detik.com*, dan *Inilah.com*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan data Informan

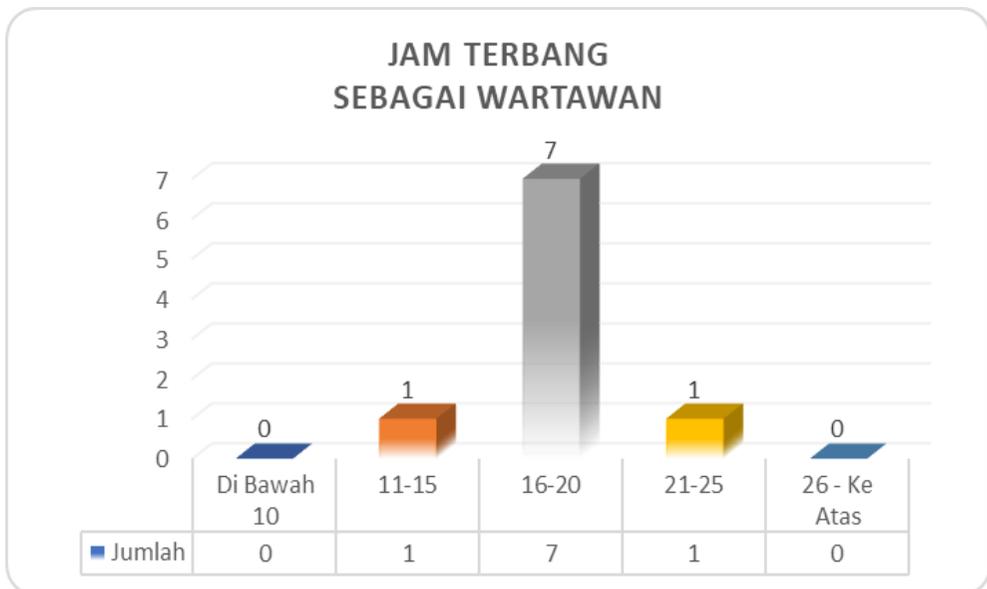
Para wartawan dari kesembilan media yang menjadi informan dapat dilihat dari 3 klasifikasi. *Pertama*, klasifikasi wartawan dilihat dari atau masa kerja. *Kedua*, klasifikasi wartawan dilihat dari usia; dan ketiga, klasifikasi wartawan dilihat dari jenjang pendidikan terakhir wartawan. Masa kerja atau jam kerja dalam profesi kewartawanan umumnya menjadi salah satu indikator penting untuk menilai profesionalisme, kemampuan, akses jaringan, dan pengalaman reportasi dalam beragam liputan. Jam terbang juga umumnya memiliki keterkaitan dengan tingkat kecerdasan di dalam menentukan sudut pandang pemberitaan.

Dalam riset ini penulis akan memetakan informan dengan melihat jam terbang atau masa kerja mereka di media massa. Hitungan masa kerja dimulai sejak mereka aktif menjadi wartawan di media pertama sampai dengan media kini mereka berkiprah. Tidak ada (0) wartawan yang memiliki masa kerja di bawah 10 tahun. Ini artinya bahwa wartawan yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki masa kerja di atas sepuluh tahun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan yang memiliki masa kerja antara 11 sampai dengan 15 tahun sebanyak 1 orang, wartawan yang memiliki masa kerja antara 16

sampai dengan 20 tahun sebanyak 7 orang, dan wartawan yang memiliki masa kerja antara 21 sampai 25 tahun sebanyak 1 wartawan. Adapun wartawan yang memiliki masa kerja di atas kerja di atas 26 tahun tidak ada (0) satu pun.

Data jam terbang atau masa kerja wartawan yang menjadi informan sebagaimana dipaparkan di atas, secara grafis dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

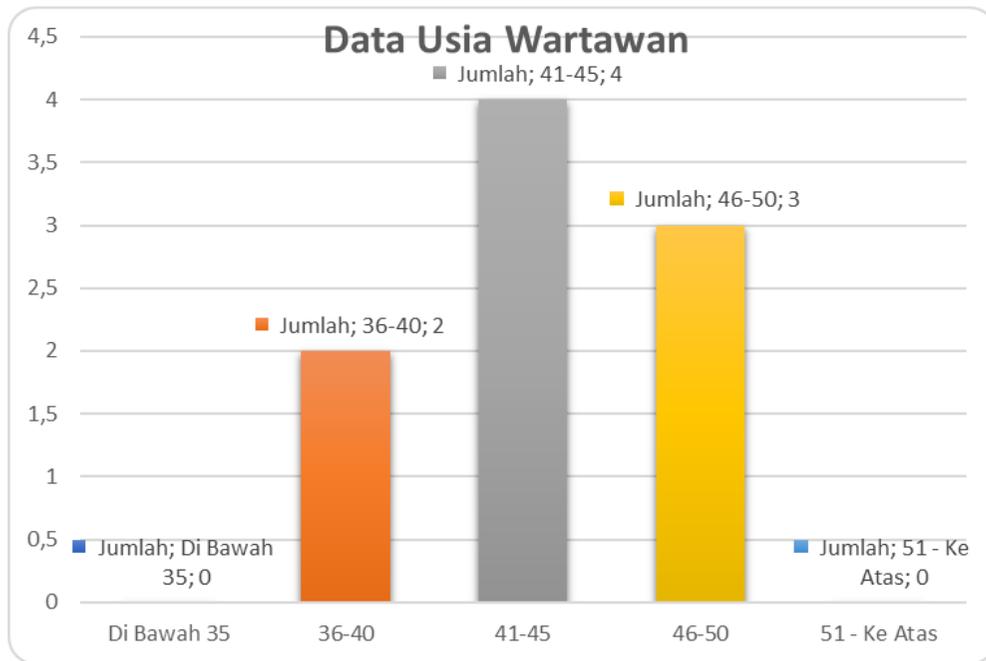
Faktor usia atau umur umumnya menjadi salah satu indikator penting dalam memahami tingkat kedewasaan, kematangan, dan kebijaksanaan wartawan, baik dalam menggali, mengolah, maupun dalam mengungkap data dan fakta yang akan mereka informasikan kepada khalayak media. Dalam kajian psikologi, tingkat usia seseorang juga umumnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kematangan, dan kearifan yang bersangkutan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti juga mencoba mengklasifikasikan informan dilihat dari usia.

Dengan berpijak pada data penelitian, maka profil informan dilihat dari usia atau umur mereka, maka dapat dikemukakan bahwa usia wartawan yang berada di bawah 35 tahun dalam penelitian tidak ada (0) seorang pun. Ini mengandung arti bahwa wartawan yang menjadi informan dalam penelitian ini semuanya memiliki usia di atas 35 tahun. Data menunjukkan bahwa wartawan yang berusia antara 36 sampai dengan 40 tahun sebanyak 2 orang, wartawan yang berusia antara 41 sampai dengan 45 tahun sebanyak 4 orang, dan wartawan yang

berusia 46-50 tahun yang menjadi informan penelitian ini sebanyak 3 orang. Data juga menunjukkan bahwa tidak ada (0) seorang wartawan berusia di 51 tahun yang terpilih menjadi informan penelitian ini.

Secara grafis, data usia wartawan yang menjadi informan dalam penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2



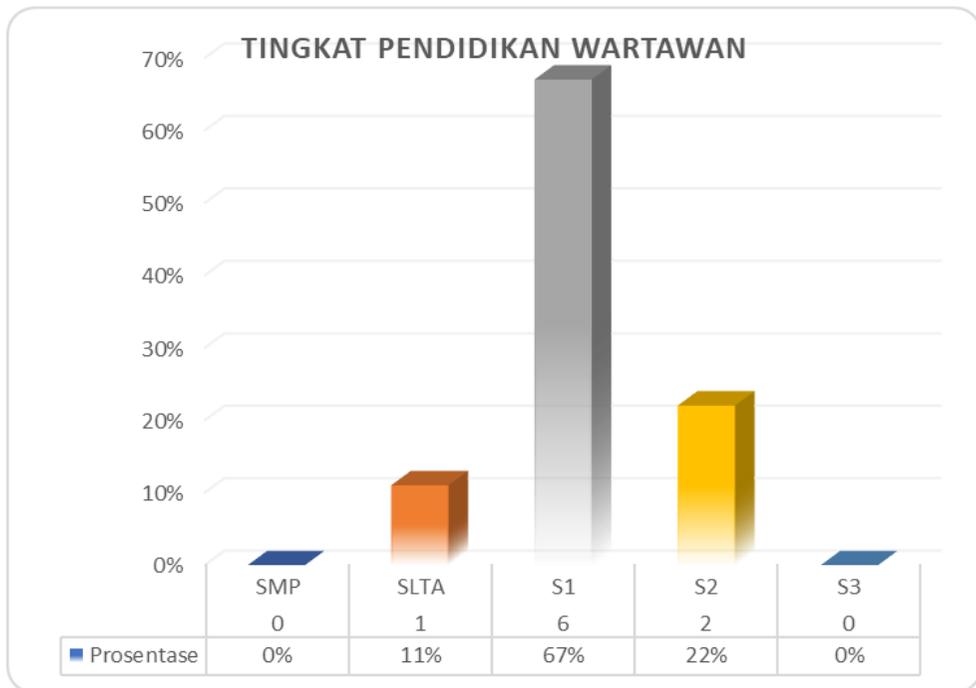
Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Profesionalisme, kematangan, dan kearifan wartawan umumnya bukan hanya ditentukan oleh usia, dan jam terbang. Andil pendidikan juga diduga kuat memiliki peran tidak kecil. Menimbang itu, maka pendidikan terakhir informan pun dicoba dipetakan. Peneliti menganggap penting agar hasil penelitian yang berhasil diolah mampu diserap, dicerna, dan dimaknai secara tepat oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan.

Klasifikasi wartawan dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, dapat dilihat pada paparan berikut: wartawan dengan pendidikan di bawah SMP sebanyak 0 orang; wartawan dengan pendidikan SLTA sebanyak 1 orang; wartawan dengan pendidikan S1 sebanyak 6 orang; wartawan dengan pendidikan S2 sebanyak 2 orang; dan tidak ada seorang pun (0) wartawan yang menjadi informan dalam penelitian berpendidikan S3.

Secara grafis, tingkat pendidikan wartawan yang menjadi informan dalam penelitian dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Pemaknaan Tentang Konflik Agama

Makna menurut Schutz, ada dua macam, yaitu makna subjektif dan makna objektif. Makna subjektif diartikan sebagai konstruksi realitas tempat seseorang dalam mendefinisikan komponen realitas yang bermakna bagi dirinya. Adapun makna objektif adalah seperangkat makna yang ada, dan hidup dalam bingkai budaya yang dipahami secara bersama (Haryanto, 2012).

Berdasarkan penelitian, wartawan umumnya memaknai konflik agama sebagai peristiwa yang menarik, penting, dan sensitif. Peristiwa konflik agama yang terjadi dimaknai menarik, karena konflik agama adalah peristiwa yang bukan hanya melibatkan dua pihak atau lebih, tetapi juga menjadi 'magnet' yang dapat menjaring khalayak media lebih banyak. Konflik agama dimaknai penting, karena di tengah masyarakat, ketika konflik agama terjadi seringkali muncul informasi yang simpang siur, memihak, bahkan informasi bohong (*hoax*). Melihat realitas ini, wartawan dengan medianya merasa memiliki tanggung jawab untuk meluruskan informasi yang tidak jelas. Intinya, wartawan memaknai penting berita konflik, karena selain banyak masyarakat yang ingin mengetahui akar penyebab dan perkembangan konflik agama yang terjadi, juga untuk meluruskan informasi secara berimbang, mendalam, dan tidak memihak. Konflik

agama dimaknai sensitif, karena konflik yang satu ini umumnya memiliki keterkaitan erat dengan keyakinan dan pandangan hidup yang bersifat sakral, sehingga bila tidak hati-hati dalam memberitakan akan sangat mudah memicu emosi keagamaan, dan mengobarkan konflik lebih besar.

Konflik berbasis agama, di tengah masyarakat yang heterogen, dan multi-agama seperti di Indonesia umumnya dimaknai wartawan sebagai peristiwa yang menarik dan penting untuk dipublikasikan kepada khalayak. Tapi di sisi lain, wartawan juga memaknai konflik agama sebagai peristiwa yang membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, baik di dalam mencari maupun di dalam mengomunikasikan atau mempublikasikannya. Konflik agama juga dimaknai sebagai peristiwa sensitif yang membutuhkan kearifan wartawan di dalam mengemas data dan fakta yang akan disampaikan kepada khalayak. Tidak bisa sembarangan, terlebih serampangan. Konflik agama juga dimaknai wartawan sebagai isu yang meresahkan dan menakutkan masyarakat.

Peristiwa konflik agama dikatakan menarik, karena konflik agama merupakan konflik yang di dalamnya terkandung unsur ketegangan, sekaligus aspek sensitivitas yang dinilai memiliki magnet kuat dalam menyedot perhatian masyarakat. Konflik agama juga dinilai penting diberitakan karena dalam peristiwa konflik agama seringkali tersebar informasi yang simpang siur dan tidak jelas sumbernya, sehingga wartawan merasa berkewajiban dan memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskannya.

Diakui informan, memublikasikan peristiwa konflik agama bukanlah pekerjaan mudah. Risikonya besar, sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian di dalam mempublikasikannya. Ini dilakukan agar konflik yang terjadi tidak malah meluas dan kian membesar. Wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut meredam konflik, bukan sebaliknya memprovokasi agar konflik agama kian berkobar. Umumnya, tujuan wartawan di dalam mempublikasikan peristiwa konflik agama lebih pada upaya agar duduk persoalannya menjadi jelas, terfokus pada fakta dan data yang valid, dan berusaha meredam konflik agama tidak semakin membesar.

Tugas wartawan di dalam menyebarkan berita—termasuk berita terkait konflik agama—harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Peristiwa konflik yang diberitakan seharusnya bertujuan memperkecil konflik, bukan malah mengakibatkan konflik menjadi besar. Melalui pemberitaan yang kita sampaikan, kata informan A1, diharapkan akan muncul kejelasan duduk persoalan, dan mencapai solusi terbaik, hingga pada akhirnya akan menuju pada perdamaian antar umat beragama.

Wartawan dengan media yang dikelolanya memiliki peran strategis di dalam memperkecil api konflik antar-umat beragama. Melalui perannya sebagai penggali dan penyebar informasi, wartawan memiliki posisi penting yang tak bisa

diabaikan di dalam meredam konflik agama, di antaranya dengan membuka dan memberi ruang dialog berbagai pihak yang berkonflik. Namun diakui Informan A2, dengan dalih meningkatkan rating dan jumlah pemirsa, wartawan melalui medianya sering “menggoreng” peristiwa konflik agama agar kian memanas. Padahal, wartawan melalui medianya dapat memosisikan diri untuk meredam konflik, atau setidaknya konflik agama yang terjadi tidak menjadi lebih besar. Langkah strategis yang dapat dilakukan wartawan, di antaranya dengan membuka ruang-ruang dialog bagi berbagai pihak yang terlibat konflik.

Dalam kacamata jurnalistik, unsur konflik dalam sebuah peristiwa atau kejadian apa saja, terlebih lagi konflik agama--umumnya akan menjadi titik bidik wartawan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, sehingga konflik agama menarik dan penting diberitakan wartawan kepada masyarakat. Konflik antara satu pihak dengan pihak lainnya selalu menarik wartawan untuk mengangkat pena, dan menulis berita (Darsono & Muhaemin, 2012: 30).

Pemaknaan konflik agama sebagai peristiwa yang menarik, penting, dan sensitif diungkapkan oleh hampir semua wartawan yang menjadi informan penelitian. Konflik agama dimaknai sebagai peristiwa yang menarik dan penting untuk diberitakan, selain karena konflik agama diyakini mampu menyedot perhatian khalayak luas, tetapi konflik agama juga tergolong peristiwa sensitif, yang membutuhkan pemahaman dan perspektif wartawan yang lebih luas dan komprehensif di dalam memublikasikannya, sehingga diharapkan berita yang dikomunikasikan wartawan mampu meredam konflik, bukan sebaliknya memicu konflik yang lebih besar.

Pemaknaan konflik agama sebagai peristiwa yang menarik, penting, dan sensitif diutarakan sebagian besar informan. Konflik agama menarik, karena bisa menyedot perhatian masyarakat. Konflik agama juga dimaknai sebagai sebuah isu yang sensitif, yang bila tidak proporsional, dan hati-hati di dalam memberitakannya bisa mengundang konflik agama berkobar kian lebih besar. Hal ini seperti dikemukakan informan A3, bahwa konflik agama adalah isu yang sangat sensitif, karena itu jangan dibesar-besarkan. Media seharusnya bisa memediasi untuk perdamaian. Informan A4 memaknai konflik agama sebagai sesuatu yang mudah membesar. Menurutnya, “Konflik agama terjadi karena adanya kekurangpahaman sehingga terjadinya kesalahpahaman. Hal itu sangat mudah membesar mengingat Indonesia adalah masyarakat multi-agama dengan agama Islam sebagai mayoritasnya.”

Sensitivitas pemberitaan konflik agama menuntut wartawan bersikap netral, tidak berpihak, dan memberi ruang yang sama kepada para pihak yang berkonflik. Tujuannya bukan sekadar agar masyarakat tidak resah, tetapi lebih jauhnya diharapkan mampu meredam konflik, atau setidaknya tidak memicu konflik yang lebih besar. Informan A4 dan A5 berpendapat senada bahwa wartawan adalah profesi yang netral. Dalam melakukan aktivitas jurnalistik,

wartawan harus berada di tengah-tengah kedua kelompok yang berkonflik. Namun harus diakui bahwa media masih memiliki kelemahan seperti memelintir berita, dan cenderung mengutamakan mengedepankan *talking news*. Kelemahan lain adalah sifat reaksioner media yang hanya meliput jika peristiwa terjadi. Contohnya, menurut Sirait (2007: 220), media hanya meliput tentang konflik Aceh jika ada penembakan atau peristiwa separatist yang terjadi.

Dalam pemberitaan konflik agama yang tergolong isu sensitif, wartawan profesional jauh lebih diperlukan. Wartawan yang dibutuhkan, bukan hanya wartawan yang tidak mudah terbawa emosional, tetapi juga harus wartawan yang bekerja dengan berlandaskan pada fakta dan data. Namun syarat tersebut juga belum cukup, wartawan peliput dan penulis peristiwa konflik agama juga harus paham latar belakang peristiwa konflik agama itu terjadi. Ini penting agar ketika menulis berita konflik, wartawan mampu meredam konflik atau setidaknya mendudukkan masalah secara proporsional.

Pendapat itu, secara substansial senada dengan penegasan informan A6. Dalam memperlakukan konflik berbasis agama, wartawan tidak boleh terbawa emosi. Wartawan harus benar-benar bekerja berlandaskan fakta. Wawasan wartawan saat meliput konflik, hendaknya mempunyai data-data pendukung yang melatarbelakangi kelompok-kelompok yang bertikai, jangan sampai wartawan terjebak terbawa arus untuk kepentingan pihak-pihak yang bertikai. Dalam memberitakan konflik agama, wartawan seharusnya bukan hanya memberitakan peristiwanya, tapi juga harus diikuti dengan kisah yang melatarbelakangi terjadinya konflik, dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga ada kejelasan mengenai latar belakang atas peristiwa yang terjadi.

Pandangan itu sejalan dengan praktik jurnalisme damai. Dalam kaitannya dengan konflik agama, praktik jurnalisme damai menjadi penting dilakukan wartawan agar reportase dan berita yang dihasilkan wartawan dapat menawarkan solusi bagi berbagai pihak yang berkonflik, bukan sebaliknya memicu konflik lebih besar. Jurnalisme damai dalam praktiknya mensyaratkan kesediaan dan kemampuan wartawan untuk berempati pada peristiwa yang dialami pihak-pihak bertikai. Jurnalisme damai dapat terwujud bila saja berita konflik itu diolah melalui *comprehensive reporting* dan *balancing reporting* yang memperhatikan sisi lain dari suatu peristiwa, serta *interpretative reporting* yang menstimuli khalayak di dalam memahami latar belakang peristiwa (Setiati dalam Juditra, 2016)

Konflik agama yang dimaknai sebagai isu sensitif sejatinya berimplikasi pada sikap wartawan untuk memberitakan atau tidak. Hal ini akan sangat tergantung pada sikap wartawan, khalayak, dan kebijakan media tempat dia bekerja. Informan A7 berpendapat bahwa konflik agama harus diberitakan, tetapi yang terjadi terkadang ada media yang tidak memberitakan karena hal-hal tertentu. Salah satunya kekhawatiran terhadap khalayak mereka. Tapi begitu,

konflik agama tetap harus menjadi berita yang proporsional, seimbang, dan menampilkan fakta di lapangan. Kebijakan redaksi juga memegang peran dalam memberitakan atau tidak memberitakan konflik agama. Kebijakan redaksi juga menentukan bagaimana peristiwa konflik agama itu diberitakan. Ini sejalan dengan pengalaman informan A5, bahwa wartawan adalah profesi yang netral, dan di dalam melakukan aktivitas jurnalistik wartawan dituntut berada di tengah-tengah kedua kelompok yang berkonflik.

Dalam mengangkat berita konflik, menurut Yusuf (2010), setidaknya ada tiga posisi media. *Pertama*, sebagai *issue intensifier*, yakni memunculkan konflik, kemudian mempertajamnya. Media berusaha mem-*blow up* realitas menjadi isu sampai semua dimensi konflik terlihat transparan. *Kedua*, sebagai *conflict diminisher*, yakni menenggelamkan isu atau konflik. Biasanya bila ada media bersangkutan memiliki kepentingan baik ideologis maupun pragmatis. *Ketiga*, sebagai *conflict resolution*, yakni menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif dan mengarahkan para pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.

Secara etis, media memang harus berjarak dari konflik, dan tidak menjadi pihak yang terlibat di dalamnya. Meminjam istilah Kovack (2008), media seharusnya tidak mencari musuh, dan juga tidak mencari kawan. Media harus bersikap selidik terhadap semua pihak. Tugas media adalah membantu masyarakat memahami permasalahan dengan cara menyajikan plusminus fakta, ide, atau opsi-opsi yang sedang diperdebatkan secara memadai dan independen (*interrogating the fact*). Untuk itu, media harus melakukan proses verifikasi secara disiplin dan konsekuen. Benar apa yang dikatakan Ardianto, dkk (2007: 202), jurnalis atau orang yang terlibat dalam komunikasi massa harus memiliki tanggung jawab dalam memberitakan sesuatu, apa yang diberitakan media massa harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jurnalis tidak sekadar menyiarkan informasi tanpa tanggung jawab akan dampak yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini bisa pada Tuhan, masyarakat, profesi atau dirinya masing-masing.

Dengan meminjam teori interaksi simbolik, maka pemaknaan wartawan terkait konflik agama sejatinya tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan proses komunikasi. Hal demikian dapat dimengerti, mengingat awalnya makna itu tidak memiliki arti sampai dikonstruksi secara interpretatif oleh individu melalui proses interaksi. Hal demikian sejalan dengan tiga dari tujuh asumsi Blumer, yakni: (1). Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka; (2). Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia; dan (3) Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif (Siregar, 2011).

Motif Reportase Konflik Agama

Motif dapat dimaknai sebagai alasan seseorang di dalam melakukan sesuatu. Dalam teori fenomenologi, Schutz memperkenalkan dua istilah motif. *Pertama*

motif “sebab” (*because of motive*), yang sebut juga sebagai motif masa lalu. Motif ini berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang. Dalam istilah lain, *because of motive* adalah motif yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan tertentu. Motif “sebab” merupakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu.

Kedua, motif “tujuan” (*in order to motive*) yang juga disebut motif masa depan. Motif ini berkaitan dengan motif yang ingin dicapai oleh seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu. *In order to motive* ini merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu. Dengan istilah lain, *in order to motive* adalah faktor-faktor atau alasan yang mendasari tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang di dalam melakukan tindakan tertentu (Haryanto, 2012: 149).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa motif wartawan di dalam melakukan reportase konflik agama, lebih pada kepentingan mengabarkan peristiwa yang bernilai berita, mendudukkan masalah secara berimbang, dan meluruskan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Hampir semua informan mengakui ketiga motif itu tumbuh dan muncul sebagai faktor utama yang mendorong mereka melakukan reportase konflik agama. Informan A2 & A9 yang aktif melakukan reportase konflik agama menegaskan bahwa motif melakukan reportase dan memberitakan konflik berbasis agama, karena konflik agama merupakan peristiwa yang memiliki nilai berita dan mempunyai magnet kuat dalam menarik perhatian masyarakat luas.

Motif yang sama juga diungkapkan informan A6. Wartawan yang sudah sering meliput dan memberitakan konflik berbasis agama ini juga menegaskan bahwa motif melakukan reportase konflik agama lebih terdorong karena pertimbangan bahwa konflik agama adalah peristiwa penting yang bernilai berita. Dikatakan bernilai berita, karena konflik agama seringkali bukan hanya mampu menyedot keingintahuan masyarakat luas, tetapi juga terkadang ada pihak-pihak lain yang mencoba menunggangi konflik agama itu.

Sedikit berbeda dengan informan lainnya, informan A1 mengaku ia termasuk wartawan yang tidak banyak memberitakan konflik berbasis agama. Bahkan sejak menjadi wartawan, redaktur hingga sekarang kembali ke lapangan, informan ini justru berusaha menghindari pemberitaan konflik berbasis agama. Kalau pun ada penugasan mengenai pemberitaan konflik agama, biasanya tidak akan menyebutkan identitas agamanya. Di Judul maupun tubuh berita hanya menyampaikan fakta mengenai peristiwa bahwa benar telah terjadi konflik antara dua kelompok pemeluk agama. Bahkan, kalau dari pertimbangan redaksi, isu konflik yang diberitakan itu berpotensi meluas dan membesar, maka diputuskan pemberitaan tersebut akan dihentikan dan tidak dilanjutkan. Ada beberapa

konflik berbasis agama yang menarik perhatian masyarakat dan menjadi bahan pemberitaan media. Di antaranya peristiwa konflik agama yang melibatkan Umat Kristiani dengan kristiani seperti kasus perebutan kekuasaan Gereja HKBP di Jalan Riau Bandung, umat Islam dengan umat Kristiani ketika terjadi pembubaran kegiatan ibadah di salah satu gereja yang disinyalir tidak berizin. Ada juga kasus konflik antara kelompok muslim dengan kelompok lainnya, seperti kasus Ahmadiyah, dan aliran sesat.

Informan A4 yang sudah cukup banyak meliput peristiwa konflik agama, seperti kasus Syiah vs Sunni, dan kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama juga menegaskan hal yang sama. Motif yang mendorongnya memublikasikan konflik agama, diakuinya, bahwa sesungguhnya konflik berbasis agama adalah isu yang cukup berat untuk diangkat sebagai berita. Namun kalau memang sudah melibatkan massa yang sangat banyak, dan telah menjadi konsumsi publik, mau tidak mau media harus memberitakan peristiwa tersebut.

Dalam reportase dan pemberitaan konflik agama, kearifan wartawan memiliki peran strategis. Ini dapat dimafhumi mengingat agama memiliki kekuatan dahsyat, baik dalam mewujudkan perdamaian maupun permusuhan, dan media memiliki 'hak penuh' dalam memilih, menentukan dan mengonstruksi fakta. Karena itu, jangan-jangan, sikap intoleran, dan kekerasan atas nama agama juga mendapat sumbangsih media melalui penentuan *angle* dan pemingkaiian fakta dalam beragam pemberitaan selama ini (Muhaemin & Sanusi, 2019).

Terkait dengan frekuensi liputan konflik agama, informan A3 mengakui dirinya sangat sering meliput konflik agama. Karena konflik agama memang sudah sangat sering terjadi, baik di level nasional, maupun regional yang berdampak ke Jawa Barat. Motifnya ingin mengabarkan kepada khalayak, mendudukkan masalah secara berimbang, dan meluruskan kesimpangsiuran informasi yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut pengakuan informan A7 dirinya bukanlah wartawan yang sering melakukan reportase konflik agama. Tapi selama menjadi wartawan pernah melakukan beberapa kali peliputan konflik berbasis agama seperti kasus Hizbur Tahrir Indonesia (HTI), dan kasus penistaan agama. Motif memublikasikan berita konflik agama, bukan tanpa alasan. Menurutnya, "Kita lebih terdorong karena berniat memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat, terutama untuk meluruskan kesimpangsiuran berita di masyarakat."

Adapun informan A8 mengatakan bahwa berita diangkat lebih fokus pada sisi kemanusiaan dan fakta kebenarannya. "Awalnya memang seperti berat sebelah, seperti menyuarakan suara mayoritas, tapi kita juga mengakomodir suara minoritas," paparnya seraya mengatakan bahwa reportase konflik yang relatif sering dilakukan adalah reportase konflik antara Syiah dan Suni, tapi juga pernah meliput konflik internal gereja HKB.

Dalam konteks reportase konflik agama, motif apapun yang ada pada diri wartawan tentunya tidak terlepas dari dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya dalam dirinya yang kemudian mengarahkan pada tindakan. Ini sejalan dengan pandangan Garungan (Nindito, 2013), bahwa motif-motif itulah yang kemudian memberi arah dan tujuan pada tindakan tertentu. Namun terlepas atas motif apapun, wartawan wajib menjunjung tinggi prinsip netralitas, berimbang, akurat, adil, dan tidak memihak di dalam pemberitaan. Menurut Hasan, netralitas, independensi atau objektivitas media massa menjadi syarat utama dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan media dengan kehidupan politik dan publik (Hasan, 2014).

Dalam prinsip jurnalistik, terlebi dalam mengangkat kasus konflik agama, netralitas adalah harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam istilah Darajat, suka tidak suka wartawan perlu berusaha ekstra untuk mampu bersikap netral (2012). Dalam konteks reportase konflik agama, motif wartawan yang terbingkai ketat dengan prinsip netralitas, berimbang, adil, dan tidak memihak diharapkan akan melahirkan berita-berita yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga mampu menyodorkan solusi bagi terwujudnya rekonsiliasi para pihak yang berkonflik. Cermat dalam menggali data, dan bijak dalam memberitakan sejatinya menjadi kunci penting wartawan dalam meredam konflik agama.

Penyebab Konflik Agama

Konflik agama tentu bukan tanpa penyebab, juga bukan tanpa solusi. Rosyid (2014 : 75) menegaskan bahwa ikhtiar penting sebagai solusi adalah mencari akar persoalan yang menjadi pemicunya. Akar penyebab tumbuh berkembangnya radikalisme yang mengatasnamakan agama membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif. Ini penting karena penyebabnya bisa karena banyak faktor, bukan hanya karena pemahaman agama yang dangkal, tetapi juga faktor-faktor lain (Muhaemin, 2013).

Dalam pandangan informan, lahirnya konflik agama umumnya terjadi akibat perbedaan pandangan atau perspektif, kesalahpahaman, intoleransi, fanatisme berlebihan, lemahnya payung hukum, ketidaktegasan pemerintah, pemahaman agama yang kurang matang, kurang kemampuan tokoh agama meredam emosi massa, dan adanya pihak tertentu yang berkepentingan.

Dalam konteks konflik agama di Indonesia, perbedaan pandangan dan perspektif kerap terjadi, baik terkait perbedaan dalam masalah ketuhanan, kenabian, *imamah*, maupun masalah izin tempat peribadatan. Perbedaan pandangan dan perspektif keagamaan ini menjadi salah satu sebab terjadinya konflik keagamaan di Indonesia yang berkepanjangan dan seringkali tak terselesaikan dengan baik. Perbedaan pandangan dan perspektif yang berbeda ini menjadi masalah mendasar yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perbedaan perspektif keagamaan dan sikap tidak bijak yang menyinggung pemeluk agama

lain akan mudah menyulut ketersinggungan pemeluk agama lain.

Perilaku yang tidak santun, dan sikap mencemooh agama lain akan sangat mudah menyulut konflik agama menjadi semakin besar dan memicu rasa sakit hati pemeluk agama lain. Celetukan-celetukan yang menyinggung satu golongan agama tertentu, biasanya yang akan menjadi besar, dan memunculkan kegaduhan yang cukup berkepanjangan. Kasus Ahok yang melakukan intepretasi ayat secara tidak benar, salah satu contohnya, terbukti memunculkan ketersinggungan umat Islam. Kondisi semacam ini menjadi celah mudah bagi masuknya pihak-pihak tertentu di dalam memainkan kepentingan politiknya. Kasus Ahok yang dianggap sebagai penistaan agama ini yang kemudian ketika di-*blow up* media maka tak aneh bila kemudian amarah umat Islam di negeri ini juga terjadi.

Konflik agama yang terjadi, akibat adanya fanatisme berlebihan yang kemudian memunculkan sikap intoleransi tak terkendali. Para informan berpandangan bahwa sikap fanatisme berlebihan memiliki andil besar bagi munculnya sikap intoleransi yang tidak terkendali. “Masing-masing kelompok terlalu fanatik dengan ideologinya sehingga terjadinya perpecahan,” kata informan A7. Dari sekian banyak kasus konflik agama, memang diakui informan, sikap intoleransi dan ketidakpahaman antara pemeluk salah satu agama dengan pemeluk agama atau paham lain juga memiliki kontribusi terjadinya konflik agama yang terjadi. Hal demikian sejalan dengan pendapat Muhaemin dan Sanusi bahwa sikap intoleran dapat memicu konflik yang membahayakan NKRI. Padahal sejatinya, berpuluh tahun Indonesia hidup dalam suasana yang sejuk dan damai. Sikap intoleransi mengubah wajah agama menjadi sesuatu yang menakutkan, dan agama seringkali ditarik demi kepentingan politik pragmatis (2019: 18)

Tak hanya itu, konflik agama di Indonesia menurut informan, juga terjadi akibat pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakan keagamaan dan keberagaman tidak melakukan dialog secara intensif terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga produk kebijakan itu memicu rasa ketidakadilan atau memunculkan kesalahpahaman informasi. Tak hanya itu, konflik agama juga bukan hanya terjadi karena perbedaan pandangan antarpemeluk satu agama dengan pemeluk agama lainnya, serta sikap fanatisme, dan sikap intoleransi yang berlebihan, tetapi juga muncul karena tingkat pemahaman agama yang relatif kurang. Pemahaman para pemeluk agama yang kurang memadai dinilai informan akan sangat mudah menyulut amarah dan emosi keagamaannya dibanding mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang lebih baik.

Dalam banyak kasus, konflik agama juga dinilai informan bukan semata masalah yang agama, tetapi juga karena adanya pihak tertentu yang berkepentingan dengan konflik agama. Ketika konflik agama sudah ditunggangi kepentingan tertentu di luar agama, seperti kepentingan politik misalnya, maka konflik agama yang demikian kerap berlangsung cukup lama, dan

berkepanjangan. Bahkan konflik agama jenis ini umumnya tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Adanya kepentingan tertentu terkadang menjadi faktor penyebab konflik agama tumbuh menjadi konflik yang cukup sulit solusinya, selain membutuhkan waktu, juga memerlukan pelacakan secara ekstra terkait pihak-pihak berkepentingan atas kasus konflik agama itu sendiri. Pihak yang menunggangi konflik agama umumnya menjadikan agama sebagai alat untuk menyerang kelompok lain, dan menjadikan agama sebagai “amunisi canggih” untuk menghantam lawan kepentingannya.

Dalam konteks konflik agama, sumber konflik yang muncul dan terjadi juga dapat ditelaah dengan meminjam teori konflik. Lewis Coser (1956). Ada tiga kategori teori konflik. *Pertama*, teori karakteristik individual yang menjelaskan bahwa beberapa konflik dapat dipicu oleh tokoh dengan karakteristik tertentu. *Kedua*, teori proses sosial (*Social Process Theory*), yang menjelaskan bagaimana masyarakat berinteraksi secara natural, dan teori ini meyakini bahwa konflik disebabkan oleh proses sosial ini. *Ketiga*, teori struktur sosial (*Social Structure Theory*) yang menjelaskan konflik antarkelas dan perjuangan di dalamnya. Perlawanan kelas atau struktur inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Pengkategorian teori tentang sumber konflik tersebut memiliki peran strategis dalam menelisik akar konflik, dan memudahkan jalan dalam pencarian resolusi konflik (Syahputra, 2006 : 26-30).

Solusi Konflik Agama

Dalam konteks solusi untuk meredam dan menyelesaikan kasus konflik agama, para informan menawarkan solusi berupa penyelesaian hukum secara tegas, pentingnya payung hukum yang jelas, perumusan kebijakan yang didialogkan, pemuka agama yang tampil lebih menyejukkan, dan kewajiban pemerintah untuk membuka forum-forum diskusi antar-umat beragama atau aliran dalam agama.

Ketegasan pemerintah bersifat mutlak. Berdasarkan pada pengalaman reportase konflik agama yang terjadi, demikian menurut para wartawan yang menjadi informan A9, penting adanya ketegasan pemerintah di dalam mengatasi persoalan konflik berbasis agama. Pemerintah tidak bisa berpangku tangan, dan abai atas konflik agama yang terjadi. Tanpa sikap tegas pemerintah atas konflik agama yang terjadi hanya akan membuat para pelaku konflik kian sulit dikendalikan. Informan A6 berpandangan, pihak yang paling bertanggung jawab dalam menangani konflik berbasis agama sejatinya adalah pemerintahan. Penanganan konflik agama tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran para tokoh agama, atau para pihak yang terlibat di dalam konflik semata.

Dalam penanganan konflik agama dan ikhtiar meminimalisir terjadinya konflik agama, pemerintah selain harus tegas juga dituntut memiliki payung hukum yang memadai, terutama terkait regulasi keberagamaan antarpemeluk

agama di Indonesia. Ini penting, karena dalam pandangan para informan, salah satu penyebab terjadinya konflik agama adalah akibat ada celah kosong dan lemahnya payung hukum yang mengatur hubungan antarpemeluk agama. Kekosongan regulasi dan lemahnya payung hukum yang ada menjadi salah satu pemicu munculnya kesalahpahaman yang berujung pada konflik antarpemeluk agama. “Konflik berbasis agama harus ada penanganan pemerintah secara tegas, dan payung hukum yang jelas,” kata informan A6.

Payung hukum yang mengatur tentang sikap dan perilaku keberagamaan antarpemeluk agama dalam konteks membangun hidup masyarakat beragama secara berdampingan di tengah perbedaan bukan hanya penting tetapi juga mutlak. Tugas pemerintah memang tidak ringan, selain harus adanya tindakan tegas yang diharapkan akan membuat jera para pelaku konflik agama, juga penting dalam payung hukum yang jelas dalam kerangka memberikan rasa aman, dan nyaman di dalam menjalankan ajaran agama. Penyelesaian konflik agama harus diselesaikan melalui jalur hukum, karena hukum dinilai sebagai tempat tertinggi untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan. Sanksi hukum perlu diterapkan untuk memunculkan efek jera. Namun sanksi hukum untuk pelaku kekerasan berbasis agama belum maksimal, sehingga tidak memunculkan efek jera. “Akibatnya, sampai saat ini masih sering kita jumpai aksi-aksi main hakim sendiri dalam bentuk intimidasi atau aksi anarkis terhadap aktivitas kelompok beragama,” papar informan A5.

Pemerintah juga seyogyanya kian intensif membuka forum-forum diskusi antar-umat beragama atau aliran dalam agama, sehingga ikhtiar ini diharapkan akan mampu menjadi langkah efektif di dalam menyelesaikan konflik agama. Beragam potensi pemicu konflik diantara pemeluk agama, baik sesama pemeluk agama yang sama maupun berlainan agama, juga akan sangat mudah teridentifikasi sehingga dapat dengan cepat dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Kran diskusi antarpemeluk agama diyakini akan mampu meredam konflik agama yang terjadi, dan dapat menjadi forum diskusi yang lebih membuka ruang harmoni dalam keberagamaan. Penelitian [Miharja & Mulyana](#) terkait peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat menegaskan bahwa keberadaan FKUB mutlak sebagai media merukunkan umat beragama, baik dalam melayani, sebagai jejaring aspirasi, dan menjembatani penyelesaian konflik antar umat beragama (2019). Membuka ruang diskusi dan dialog antarumat beragama merupakan ikhtiar strategis bagi terwujudnya harmoni keberagamaan. [Maftuchah](#) (2015) menjelaskan bahwa dialog bukan hanya bermakna diplomasi, saling menyembunyikan kepentingan, dan menguasai untuk mencari kelemahan. Tetapi harus mampu membangun pemahaman bahwasanya berbeda bukan semata-mata merupakan identitas pasif, melainkan sarana saling melengkapi.

Tak hanya pemerintah, para pemuka agama juga harus mampu tampil sebagai pihak terdepan di dalam menyelesaikan konflik agama, bukan sebaliknya menyulut konflik menjadi lebih besar. Pemuka agama seharusnya bisa menenangkan massa pemeluk agama, mengingat massa biasanya sangat tergantung pemimpinnya. Tapi yang disayangkan, masih ada para pemuka agama biasanya *keukenb*, dan tidak mau membuka perspektif perbedaan, sehingga sangat sulit terjadinya dialog. Implikasinya konflik agama menjadi sulit diselesaikan. Bahkan dalam konteks tertentu, sebagian pemuka agama cenderung mengompromi umatnya, padahal seharusnya menyampaikan hal-hal yang lebih menyejukkan, bukan sebaliknya memperuncing perbedaan.

Media dan wartawan juga sejatinya harus menjadi bagian yang berperan besar di dalam menyelesaikan konflik agama, bukan sebaliknya muncul sebagai ‘provokator’ yang justru memicu konflik kian besar. Dalam konteks reportase dan pemberitaan konflik agama, wartawan berkewajiban memahami dan melihat persoalan konflik agama dari berbagai perspektif. Tidak hanya memberitakan dari satu sisi, tetapi harus lebih komprehensif dengan kaca pandang yang lebih luas, tidak memancing, dan menguak luka lama. “Media dan wartawan harusnya menjadi peredam konflik, sehingga khalayak semakin terbuka wawasannya, dan para pihak yang bersengketa bisa berdialog dan berdamai,” jelas informan A2.

Dalam melakukan reportase dan pemberitaan konflik agama, media dan wartawan berkewajiban untuk bersikap adil, bijak, dan tidak memihak. Langkah ini perlu dilakukan agar apa yang dikatakan [McQuail \(2015\)](#), media massa mampu bersikap independen dan profesional. Media perlu berikhtiar keras untuk melindungi dirinya dari jerat kekuatan politik dan sistem ekonomi yang akan mengganggu independensi media. Dengan ini media dapat membangun sikap yang objektif, netral, seimbang, dan adil. [Belekubun et al. \(2015\)](#) menegaskan bahwa baik wartawan maupun media tidak boleh berpihak pada siapapun, dan tetap bersikap netral. Ini penting catatan, karena media memiliki kemampuan mempengaruhi dan menciptakan opini publik.

Dalam mengangkat kasus konflik agama, media dan wartawan perlu melakukannya dengan penuh kehati-hatian, dan berikhtiar menjadi bagian di dalam proses penyelesaian konflik, bukan sebagai penyulut konflik. Media dan wartawan harus mampu memediasi, bukan sebaliknya memprovokasi para pihak yang berkonflik. Media dan wartawan dituntut kehati-hatian ketika memberitakan konflik agama. Data dan fakta yang diungkap bukan hanya harus akurat dan terseleksi dengan ketat, tetapi juga menuntut pengemasan yang lebih apik dan sudut pandang pemberitaan yang lebih luas dan komprehensif. Tak kalah pentingnya, media dan wartawan juga wajib memberikan hak dan ruang yang sama kepada para pihak berkonflik.

Perbedaan budaya dan agama yang ada dalam masyarakat memiliki potensi konflik, bila tidak dikelola dengan baik. Media massa perlu memberi respon terhadap realitas masyarakat multiagama yang rentan terjadinya konflik. Bila [Voakes et.al \(1996\)](#) memandang jurnalisme multikultural perlu dikembangkan untuk meningkatkan peranan media massa dalam mendukung pembangunan masyarakat multikultural, penulis menilai jurnalisme multiagama menjadi layak digagas dan dikembangkan media massa. Jurnalisme multiagama dapat dimaknai sebagai kegiatan pemberitaan yang memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat multiagama untuk memelihara kondisi damai dan terbangunnya sikap toleran satu sama lain. Dalam praktiknya, jurnalisme multiagama dapat menjalankan usaha-usaha konstruktif dalam pembangunan masyarakat keagamaan dan keberagaman, serta menghindari berita yang dapat menyentuh sensitivitas hubungan masyarakat yang multiagama. Praktik jurnalistik multiagama menekankan perlunya pertimbangan khusus untuk menghasilkan berita yang tidak mengganggu hubungan masyarakat multiagama dalam masyarakat.

Dalam konteks jurnalisme multiagama, wartawan media massa dapat menjalankan perannya sebagai agen yang menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi atas konflik agama yang terjadi. Pola komunikasi dan langkah pendekatan yang dilakukan wartawan akan lebih berorientasi pada asas *win-win solution*, bukan pada penonjolan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pendekatan yang dilakukan wartawan akan lebih difokuskan pada pencarian akar masalah terjadinya konflik yang kemudian diikuti dengan pencarian solusi konflik dari berbagai pihak yang diorientasikan pada pencarian jalan keluar yang sama-sama menguntungkan ([Muhaemin, Galamedia, 2021](#)).

PENUTUP

Berpijak pada hasil penelitian dan pembahasan, setidaknya ada 3 simpulan yang dapat dikemukakan. Ketiga simpulan itu sebagai berikut, *Pertama*, wartawan umumnya memaknai konflik agama sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang menarik, penting, dan sensitif. Dimaknai menarik, karena konflik agama adalah peristiwa yang bukan hanya melibatkan dua pihak atau lebih, tetapi juga menjadi ‘magnet’ kuat yang dapat menjaring khalayak media lebih banyak. Dimaknai penting, karena selain banyak masyarakat yang ingin mengetahui akar penyebab dan perkembangan konflik agama yang terjadi, juga untuk meluruskan informasi secara berimbang, mendalam, dan tidak memihak. Dimaknai sensitif, karena konflik agama mempunyai keterkaitan erat dengan keyakinan dan pandangan hidup yang bersifat sakral, sehingga bila tidak hati-hati dalam memberitakan akan sangat mudah memicu emosi keagamaan, dan mengobarkan konflik lebih besar.

Kedua, motif wartawan di dalam melakukan reportase konflik agama didasarkan pada pertimbangan untuk mengabarkan peristiwa yang bernilai berita, mendudukan masalah secara berimbang, dan meluruskan kesimpangsiuran informasi yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Umumnya ketiga motif ini muncul sebagai faktor utama yang mendorong wartawan melakukan reportase konflik agama.

Ketiga, wartawan berpandangan bahwa sumber pemicu konflik agama lebih sering akibat perbedaan perspektif, kesalahpahaman, intoleransi, fanatisme berlebihan, lemahnya payung hukum, dan ketidaktegasan pemerintah. Pemahaman agama yang kurang matang, kurang mempunyai tokoh agama dalam meredam emosi massa, dan hadirnya pihak berkepentingan di balik konflik agama juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik agama.

Keempat, wartawan berpandangan bahwa solusi atas konflik agama yang terjadi penting dilakukannya penyelesaian hukum secara tegas, adanya payung hukum yang jelas, perumusan kebijakan yang didialogkan, pemuka agama yang tampil lebih menyejukkan, dan kewajiban pemerintah untuk membuka forum-forum diskusi antar-umat beragama atau aliran dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2). DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9.
- Alpizar. (2015). Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia (Perspektif Islam). *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No. 2 Juli-Desember 2015.
- Belekubun, S., Unde, A. A., & Cangara, H. (2015). Opini Tokoh Partai Politik Terhadap Keberpihakan TV One dan Metro TV dalam pilpres 2014 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(2), 88–100.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darsono, D., & Muhaemin, E. (2012). *Secangkir Peristiwa di Mata Wartawan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Eddles-Hirsch, K. (2015). Phenomenology and Educational Research. *International Journal of Advanced Research*, 3(8).
- Haryanto, S. (2012). *Spektrum Teori Sosial*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Hasan, K. (2014). Kajian Netralitas Industri Media dalam Pemilu 2014. *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh*, 53(9), 1689–1699.
- Juditha, C. (2016). Jurnalisme Damai dalam Berita Konflik Agama Tolikara di Tempo.co. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik (Vol. 20 No. 2, Desember 2016)*.

- Kimball, C. (2013). *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan.
- Kovack, B. (2008). *Sembilan Elemen Jurnalisme Kovach Jakarta: Yayasan Pantau*.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K.A. 2014. *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maftuchah, F. (2015). Dialog dan Toleransi (Sebuah Alternatif Dakwah di Tengah Pluralitas Agama). *Jurnal Komunikas*, Vol. 9, No. 1, Januari - Juni 2015
- McQuail, D. (2015). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika
- Miharja, D. & Mulyana, M. (2019). Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat. *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 3(2)
- Muhaemin, E. (2013). *Agama dan Media di Era Informasi*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Muhaemin, (2021, 11/12). Jurnalisme Multiagama dan Harmoni Keberagamaan. *Galamedia*, 01, No. 025 LIII.
- Muhaemin, E., & Sanusi, I. (2019). Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 (1) (2019) 17-34. DOI: 10.15575/jik.v3i1.5034.
- HMZ, Nandang. (2021). Peran Media dalam Penyelesaian Konflik Sosial. *HIKMAH: Jurnal Dakwah & Sosial, Volume 1 No. 1, Maret 2021*.
- Rosyid, M. (2014). Keselarasan Hidup Beda Agama dan Aliran: Interaksi Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, dan Ahmadi di Kudus. *Jurnal Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
- Rusmulyadi. (2013). Framing Media Islam Online atas Konflik Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam, ISBN 2088-6314 Volume 03, Nomor 01, Juni 2013*.
- Sihaloho, M.J. (2016). *TB Hasanuddin: Konflik Atas Nama Agama Terus Meningkat*. <http://www.beritasatu.com/hukum/347848-tb-hasanuddin-konflik-atas-nama-agama-terus-meningkat.html>. (diakses 3 Mei 2016).
- Sindhunata. (2013). "Kata Pengantar" dalam *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan.
- Sirait, H. (2007). *Jurnalisme Sadar Konflik: Meliput Konflik Dengan Perspektif Damai*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Siregar, N. S. S. (2011). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL UMA: PERSPEKTIF*, 4(2).
- Sofian, M. R. B. M, & Hussein, A. (2013). Media Coverage on Religious Conflict in Malaysia : A Preliminary Study on How The Star and Utusan Malaysia Framed the Attempts to Subvert the Faith and Believe of Muslims in a Multiracial Thanksgiving Dinner at DUMC. *Jurnal Procedia; Social and Behavioral Sciences*.
- Syahputra, I. (2006). *Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Yogyakarta: P_Idea, Kelompok Pilar Media.

- Uswatussholihah, U. (2011). Ahmadiyah Dalam Sorotan Media Cetak Nasional: Analisis Wacana Terhadap Koran Republika dan Kompas. *Jurnal Penelitian Agama*.
- Voakes et al. (1996). Diversity in the News. A Conceptual and Methodological Framework. *Journalism & Communication Quarterly*, Vol 73, N0 3.
- Wibawa, D. (2020). Wartawan dan Netralitas Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 4 Nomor 2 (2020) 185-206. DOI: 10.15575/cjik.v4i2.10531.
- Yusuf, I. A. (2010). Dalam Kecamuk Konflik, Bagaimana Seharusnya Media Berpihak?. Sepetember 7, 2021, diakses dari https://bincangmedia.wordpress.com/2010/08/23/dalam-kecamuk-konflik-bagaimana-seharusnya-media-berpihak/#_ftn1

